

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GOWA)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

ABDUL RAHIM
10500111003

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Maasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rahim

NIM : 10500111003

Tempat/tgl.Lahir : Ujung Pandang, 2 Desember 1993

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran nama Biak
Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, September 2015

Penyusun,

ABDUL RAHIM

NIM : 10500111003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)", yang disusun oleh Abdul Rahim, NIM: 10500111003, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 M, bertepatan dengan 23 Dzulhijja 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 15 September 2015 M.
23 Dzulhijja 1436 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.ag	(.....)
Sekretaris	:	Andi Syafriani, SH.,MH.	(.....)
Penguji I	:	Akham Jayadi, SH.,MH.	(.....)
Penguji II	:	Rahman Syamsuddin, SH.,MH	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Kasjim Salenda, SH.,M.Thi	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Hamsir, SH.,MH	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.ag

NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa) ” dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, saya telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya hormati, hargai, sayangi, bahkan yang sangat saya cintai Bapak H.Ramli dan Hj.Hawati yang telah menjadi faktor utama dalam gambaran dari kisa hidup di muka bumi ini yang telah memberikan kasi sayang yang berlimpah sejak di kandung badan sampe sekarang ini. Dengan dorongan semangat dan nasehatnya yang tidak pernah pudar sehingga penulis dapat sampai pada titik sekarang ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar beserta wakil rektor I, II, III, dan VI atas segala fasilitas yang telah di berikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum beserta wakil dekan I, II, dan III Atas segala fasilitas yang telah di berikan dan senang tiasa memberikan dorongan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Hamsir, SH, M.Hum. Serketaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Istiqoma,SH, MH. Dan staf jurusan Ilmu Hukum kanda Herawati. SH. Yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta pegawai bagian akademik dalam lingkungan fakultas syariah & hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu penulis dalam menjalani studi.
6. Bapak Dr. Kasjim Salenda, SH, M.Thi selaku pembimbing I dan Dr. Hamsir. SH. M.Hum. Selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan, kontribusi ilmu pengetahuan terkait dengan judul dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman teman angkatan 2011 Ilmu hukum terkhusus Ilmu hukum 1&2 . terima kasih atas kebersamaan kalian semua yang tak ada ujungnya aatas

kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan suka duka selama 4 (empat) tahun yang telah banyak memberi masukan dan ari kebersamaan kepada saya

8. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhir kata penyusun berharap kiranya agar tugas akhir penyusunan karya ilmiah skripssi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana. Amin ya rabbal alamin.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun

Abdul Rahim

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1-14
A. LatarBelakang	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
 BAB II : TINJAUAN TEORITIS	 14-24
A. Media Sosial Era Kontenporer	14
B. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	16
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik	18

1. Hukum Pidana	18
2. Hukum Islam	21
D. Kerangka Konseptual.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	25-27
A. Jenis Dan Lokasi Peneliti.....	25
B. Metode Pendekatan Peneliti.....	25
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Instrumen Penelitian.....	26
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	27
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28-73
A. Ketentuan Hukum Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial . .	28
B. Sanksi Hukum Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	30
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 324/Pid.B/PN.Sgm Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	35
BAB V : PENUTUP	73-74
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75-76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

هَوْل : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمْ : *nu“ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi(bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِإِلَهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

ABSTRAK

Nama : Abdul Rahim

Nim : 10500111003

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

**Judul : Tinjauan Yuridids Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui
Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)**

Skripsi ini membahas tentang suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (studi kasus di pengadilan negeri gowa)

penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer data yang di peroleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Gowa dan data sekunder data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan berupa literature dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan di bahas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (lex spesialis). Delik pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Seharusnya dalam kasus seperti ini Perlu di lakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap penggunaan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi secara efisien dan efektif tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingka laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Mencapai tujuan tersebut di butuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam rana hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.¹

Sejak bergulirnya era Reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di negara Republik Indonesia. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Siapa saja berhak menyuarakan

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.2.

pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang – Undang Dasar. Angin reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan yang sesungguhnya setelah sekian lama hidup dalam pemasungan, penekanan dan pengungkungan.²

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.³

Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa,

”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.⁴

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. *Cyber (komputer)* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusialisme*, h. 3.

³Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 E Ayat 2.

⁴Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 F.

media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negaif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber*

crime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet.⁵

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixderee*, *blogger*, *friendster*, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan banyak lagi yang lain⁶. Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online* di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum di gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengaskes dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial di jalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa

⁵RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 56.

⁶Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009), h. 130.

menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak di sadari bahwa ada norma norma yang mengikat interaksi tersebut.

Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat,informasi,ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karnah bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain

Sebagai contoh yang saya temukan di media cetak terkait pencemaran nama baik. disebutkan bahwa terdakwa Fadhli Rahim, pada Selasa 6 Mei 2014 di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa didakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 310 KUHP jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008. Fadhli dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo.

Pada dasarnya, Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE ini juga di atur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat

(1) juga di atur masalah pencemaran nama baik. Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang di atur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering di sorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu di nilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.⁷

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Penghinaan juga telah di bahas dalam firman Allah Swt. Al-An'am/6:108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ^٨

كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

⁷ <http://www.bin.go.id/awas/detil/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.VGzc19aY.dpuf>, (19 Mei 2015)

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.⁸

Ulama menjelaskan bahwa hukum ayat di atas tetap berlaku sampai saat ini dan dalam keadaan apapun. Selama orang-orang kafir tidak mengganggu dan tidak di khawatirkan akan menghina Islam, Nabi Saw, atau menghina Allah Swt, maka seorang muslim tidak di benarkan menghina atau mengusik mereka. Ayat ini juga menunjukkan salah satu bentuk gencatan senjata atau perdamaian dan merupakan dalil wajib mencegah terjadinya kerusakan. Bahwa orang benar terkadang harus menahan diri untuk tidak mengambil haknya apabila akan menimbulkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada agama.⁹

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan agar tidak mempedulikan ejekan orang-orang musyrik dan mereka yang menentangnya. Allah Swt menyampaikan kepada seluruh umat muslim bahwa dalam melakukan dakwah, tidaklah harus merasa sedih dalam menerima hinaan-hinaan yang di lakukan oleh orang-orang musyrik.

Selain ayat di atas Nabi Muhammad Saw juga bersabda dalam hadis shahih riwayat Bukhari dan Muslim 72.30/6555 :

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1426/H 2005 M), h. 205.

⁹Abu Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami'li al-Akham al-Qur'an* (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risalah, 2006), h. 153-154.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ¹⁰

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda Akan terjadi fitnah, orang yang duduk pada saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih daripada yang berlari, barangsiapa berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya, maka barangsiapa mendapat tempat berlindung atau base camp pertahanan, hendaklah ia berlindung diri di tempat itu."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan fitnah, pergaulan, dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya

¹⁰Muh. Fuad Abdul Baqi, *Mutiara hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim* (Jakarta, Pustaka As Sunnah. 2011), h. 193.

diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.¹¹ Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.¹²

Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini masih di pertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingin tahuan penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana penghinaan melalui sosial media dengan mengangkat judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)”***.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang jadi fokus permasalahan yang akan di jadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimanakah kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media.

¹¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), h. 129.

¹²Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Terj.Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta. Rabbani pres, 2000), hlm. 441.

Sehubungan dengan fokus penelitian diatas, maka deskripsi pada skripsi ini meliputi aspek yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui sosial media.

Aspek yuridis merupakan cara memandang suatu masalah dalam segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan sistem hukum yang di anut oleh suatu negara

Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang di serang itu biasanya merasa malu

Sosial media adalah sebuah media online, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum di gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Tindak pencemaran nama baik melalui sosial media diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Untuk selanjutnya di sebut UU ITE) yang merumuskan:

Adapun yang di maksud dengan aspek yuridis meliputi pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat yang dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah di sebutkan di atas, maka jelaslah secara normatif bahwa pencemaran nama baik melalui sosial media adalah tindak pidana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 324/pid.B/2014/PN.Sgm tentang pencemara nama baik melalui media sosial ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini saya akui bukanlah penelitian yang Pertama, seperti yang telah di teliti oleh para peneliti sebelumnya, di temukan beberapa literature atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dapat di uraikan sebagai berikut:

Mukhlis dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet”, membahas tentang alat bukti elektronik tidak bisa di pisahkan lagi dengan

alat bukti pendapat ahli. Alasannya karena kerumitan dalam memahami sehingga dapat di pastikan bahwa aparaturnya hukum saat ini masih buta dengan hal ini.¹³

Dwi Rendra Wiratama, dalam bukunya yang berjudul “*cybercrime* dalam prespektif hukum positif di Indonesia” Buku ini membahas tentang sulitnya menentukan cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu di butuhkan optimalisasi UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Elektronik Informatika.¹⁴

Dari beberapa buku di atas, kesemuanya membicarakan tentang kejahatan *cybercrime*. Namun tidak ada satupun yang membahas tentang ketentuan, penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan demikian, menurut hemat penyusun penelitian ini telah memenuhi syarat kelayakan untuk di lakukan dalam rangka untuk menambah pemikiran hukum dan kebutuhan dalam masyarakat.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai pokok-pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya pencemaran nama baik melalui sosial media.
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan pendapat tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.

¹³ Mukhlis, *kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), h. 46.

¹⁴Dwi Rendra Wiratama, *cybercrime dalam prespektif hukum positif di Indonesia* (Malang: UBM. 2009), h. 93.

3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media.

Dan dari hasil penelitian tersebut di harapkan mampu memberikan manfaat manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum
2. Agar dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sosial media.
3. Di harapkan dapat menjadi salah satu topic dalam diskusi lembaga lembaga mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Media Sosial Era Kontenporer

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang demikian pesat di awal milenium III ini. Era *cyber* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut dengan media sosial. Media sosial ini merupakan fase perubahan di mana bagaimana orang menemukan, membaca dan membagi-bagikan berita, informasi dan konten kepada orang lain. Hal ini merupakan perpaduan sosiologis dan teknologi yang monolog (*one to many*) menjadi dialog (*many to many*) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang dari pembaca konten menjadi penerbit konten.¹⁵ Media sosial telah menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan orang-orang untuk terhubung dunia online dalam bentuk hubungan personal, politik, dan kegiatan bisnis. *Unfortunately, many bloggers and other Internet content providers fail to realize that "what you type today can haunt you tomorrow."*¹⁶

Sosial media/media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi

¹⁵RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore peterson, *Media massa dan Masyarakat modern* (Jakarta : Kencana. 2003), h. 56.

¹⁶Matthew collins, *The law of defamation and the internet* (Saint louis: university school of law, 2008), h.2.
2010).

blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Andreas Kaplan mendefinisikan media sosial sebagai “*A group of Internet - Based Applications That Build on the basis of the basic differences of ideology and Green Technology Web And That allows the creation and exchange of user- generated content*”.¹⁷

Menurut Haenlein ada enam jenis media sosial, Pertama, Proyek Kolaborasi yaitu website yang memungkinkan *user* dapat mengubah, menambah, ataupun remove konten yang ada di website. Contoh media ini adalah wikipedia. Kedua, Blog dan Microblog, dimana *user* lebih bebas mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti ‘curhat’ ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh media ini adalah twitter. Ketiga, Konten, yaitu web dimana para user dari pengguna website ini saling share konten media, baik video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya youtube. Keempat, Situs Jejaring Sosial, yaitu aplikasi yang memungkinkan *user* untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi, sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh jejaring sosial

¹⁷Andrea kaplan, *social media for educators* (London : Kluwer law international, 2000), hlm, 4.

adalah facebook. Kelima, *Virtual Game World*, yaitu dunia virtual, yang mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar- avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online. Keenam, *Virtual Social World*, yaitu dunia virtual dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, *Virtual Social World* lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya *second life*.¹⁸

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.¹⁹

B. Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media Sebagai Cybercrime

Cybercrime is a fast-growing area of crime. More and more criminals are exploiting the speed, convenience and anonymity of the Internet to commit a diverse

¹⁸Rivers L William. Jay W. Jensen. Theodore peterson, *Media massa dan Masyarakat modern*, h. 57.

¹⁹Rivers L William. Jay W. Jensen. Theodore peterson, *Media massa dan Masyarakat modern*, h. 59.

*range of criminal activities that know no borders, either physical or virtual.*²⁰

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pendapat mengasumsikan cybercrime dengan computer crime. the U.S department of justice memberikan pengertian computer crime sebagai “any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Pengertian tersebut indentik dengan yang diberikan organization of European community development, yang mendefinisikan computer crime sebagai “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data” adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “aspek –aspek pidana di bidang komputer” mengartikan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”. Dari beberapa pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cyber crime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, di mana kejahatan tersebut telah muncul sejak permulaan zaman dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Kejahatan sudah diterima sebagai suatu fakta yang merugikan baik oleh masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern. Kerugian material dapat berubah timbulnya korban, rusaknya

²⁰Graham J H Smith, *Internet law and regulation* (London: Thomson Sweet, 2007) hlm. 13.

harta benda ataupun meningkatnya biaya yang harus di tanggung oleh korban. Kerugian moril dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.²¹

Kejahatan yang terus berkembang tidak hanya pada masyarakat yang sudah maju, namun juga pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi di dunia maya (cyber/virtual). Apabila mengikuti kasus-kasus cybercrime yang telah terjadi dan jika hal tersebut di kaji dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum, kejahatan cyber merupakan kejahatan yang kompleks.²² Sampai saat ini belum di pastikan definisi yang jelas mengenai cybercrime, demikian juga dengan istilah yang di pergunakan. Selain cyber crime, terdapat juga istilah computer crime dan istilah computer related crimes.²³

C. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik

1. Hukum Pidana

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan

²¹Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama,2010), h.8.

²²David I. Baidrige, *Komputer Dan Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika,2003), h. 161.

²³Heru supratomo, *Kebijakan Komputer Dan Cyber, Serta Antisipasi Pengaturan Dan Pencegahannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001), h.3.

sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan

Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “*penghinaan*”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan²⁴

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai:

“*menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geodenaam)*”.²⁵

Berdasarkan sudut pandang hukum pencemaran nama baik Berdasarkan penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*” yang di serang itu biasanya merasa malu

Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya di cemarkan

²⁴Laden marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan* (Jakarta : Sinar grafika, 2010), h.47.

²⁵Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan* (Makassar: skripsi perpustakaan hukum unhas, 2014), h.46.

Dalam teori penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu :

a. Teori De subjectieve opvatting

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “*rasa kehormatan*”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a) Apabila Teori ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “*rasa kehormatannya*” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- b) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- c) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan de *jurisdiche begrifsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.²⁶

b. Teori De objectieve opvatting

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.²⁷

²⁶Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, h 54.

²⁷Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, h. 54.

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “*harga diri*” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “*nama baik*” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “*Nama baik*” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “*atau*” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.²⁸

2. Hukum Islam

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai Rahmatan lil 'Alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Jauh sebelumnya,

²⁸Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, h. 55.

Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (maqshid asy-Syar'iyyah) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (hifzh ad-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), perlindungan terhadap pikiran (hifzh an-'aql), perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl), dan perlindungan terhadap harta benda (hifzh al-mal). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (maslahat) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (mafsadat). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.²⁹

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang pelaksanaan hukumannya

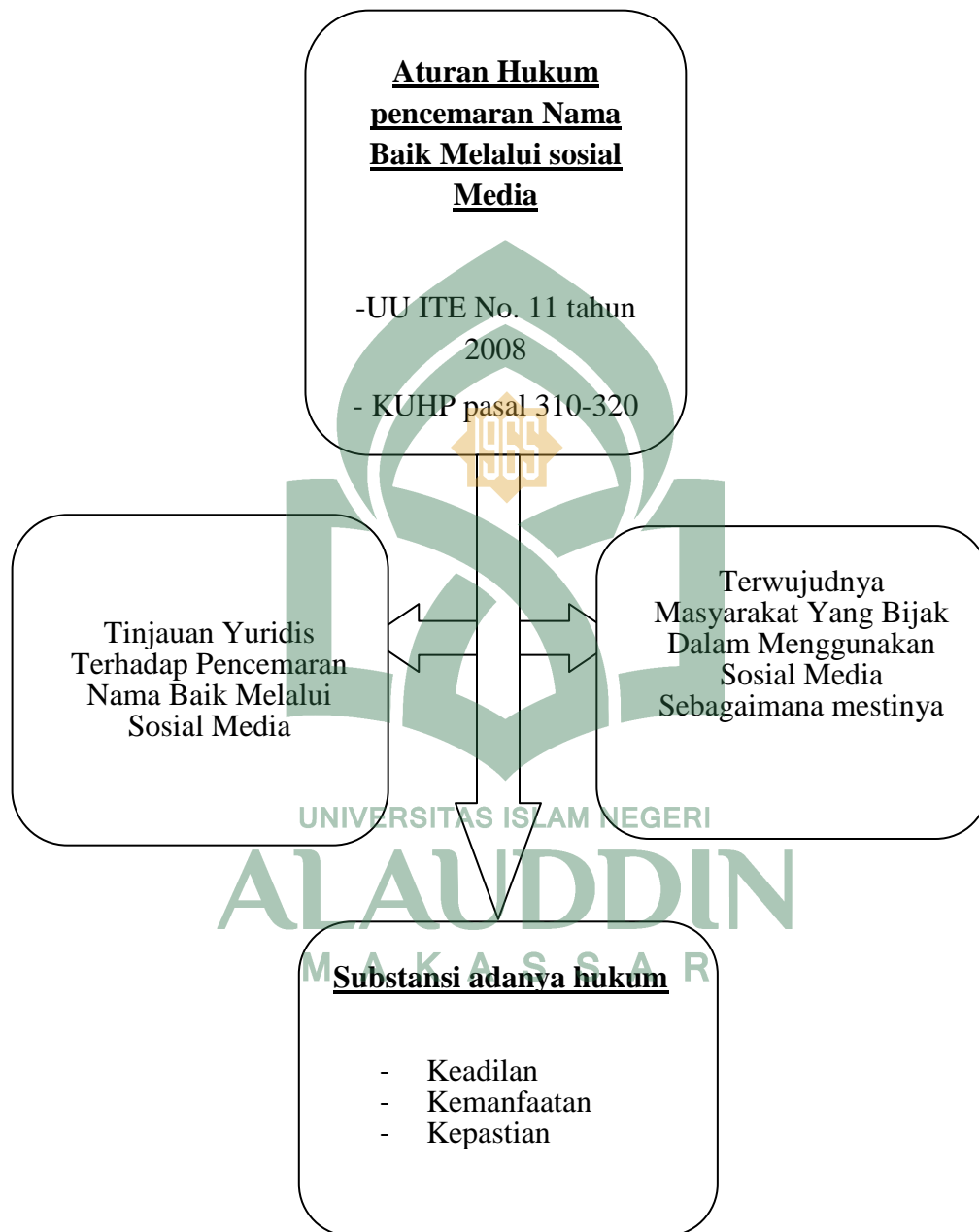
²⁹Al-Gozali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya' at-turats al-'Arobi, 2001) hlm. 287.

diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.³⁰



³⁰Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm. 250.

D. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan penyusunan skripsi. Penelitian di laksanakan di pengadilan negeri gowa. Alasan di pilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi tersebut penulis dapat mencari dan mendapatkan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual di gunakan untuk memahami konsep-konsep dalam ilmu hukum sehingga diharapkan dapat dijelaskan secara jelas mengenai fenomena kejahatan pencemaran nama baik melalui sosial media

C. Sumber Data

Data penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data primer

Data yang di peroleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Gowa.

2. Data sekunder

Data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan berupa literature dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan di bahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Cara yang di tempuh dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada prinsipnya kepustakaan ini merupakan kerangka acuan dalam membahas objek kajian yang bersifat teoritis dari pokok rumusan masalah yang di tetapkan dalam penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ialah dengan cara pengkajian bahan melalui metode normatif analisis dengan di mana sumber-sumber dari luar peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang di gunakan di jadikan menjadi satu bagian dalam hukum itu sendiri.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan objektif, maka bahan yang di peroleh di analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menafsirkan dan menjabarkan fakta-fakta yang di temukan.



BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Ketentuan Hukum Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Secara operasional pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu.

Dalam Dictionary of the English Language tindak pidana (*Crime*) ialah “*An act committed in violation of law where the consequence of conviction by a court is punishment, especially where the punishment is a serious one such as imprisonment*”³¹. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada delik pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat dikatakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa diserang harkat dan martabatnya.

Delik pencemaran nama baik secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penulis akan membahasnya berdasarkan urutan yang aturan

³¹Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, *Dictionary of the English Language*, (American Heritage: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2001), hlm. 68

yang paling umum sesuai asa *lex specialis derogat legi generali*. Aturan pertama yang membahas pencemaran nama baik adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Tentang Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di serang itu biasa merasa malu. Kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat di cemarkan Karena tersingggu.

Delik penghinaan ini telah di atur pada pasal 310 KUHP Pasal (1) dan (2)

“(1) barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, di hukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

“(2) Kalau hal ini di lakukan dengan tulisan atau gambar yang di siarkan, di pertunjukkan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu akan di hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”³²

Kemudian di atur dalam pasal 311 ayat (1)

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahu”.³³

³²Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 310, Ayat 1 dan 2

³³Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 311, Ayat 1

Semua Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Obyek dari pada penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan Teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang di pengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan. Selain munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, teknologi juga di gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan konvensional. Seperti delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah di atur pada tahun 1965, UU ITE kembali mengakomodasi ketentuan delik tersebut dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”³⁴

Pemidanaan terhadap pelanggaran dari pasal 27 ayat (3) dari UU ITE kemudian di atur dalam pasal 45 ayat (1) yang merumuskan:

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana di maksud dealam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam)

³⁴Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27, Ayat 3.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁵

Lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pandangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi di lakukan secara aman untuk mencegah penyalgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

B. Sanksi Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Sanksi dala presfektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi

³⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45, Ayat 1.

tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Dunia hukum sebenarnya sudah lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan bendanya yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik suatu perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi di batasi teritori suatu Negara, yang muda diakses kapan pun dan di manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping itu, pembuktian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di ubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bias demikian kompleks dan rumit.

Cybercrime dapat juga di artikan sebagai penyalagunaan internet, sesuatu yang bermaslahat dan mutlak di butuhkan oleh masyarakat sehingga harus ada, tetapi si salagunakan untuk merusak kehidupan masyarakat di luar tujuan penciptaannya.

Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”³⁶

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pandang sebagai delik *cybercrime*. Pemidanaan terhadap pasal-pasal di atas di atur dalam pasal 45 ayat (1) yang merumuskan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dealam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁷

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

³⁶Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27, Ayat 3.

³⁷Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45, Ayat 1.

Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sanksi yang di terapkan dalam pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 324/pid.B/2014/PN.SGM Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 6 Mei 2014 terdakwa telah menuliskan percakapan di Grup Line Ikasalis 99 yaitu :

Pukul 14.08 wita :

"Saya Setuju Gowa tidak Inovatif, Money oriented, Power Legacy, arrrgghhh, tena kabajikang, jai2mi investor nda jadi invest ka nda dkasiki bagian bupatina, saing diamami klo nda ada untungna buat dia nda jd proyekka."

Pukul 14.10 wita :

"Kalo ada yg bilang bupati gowa bagus.kl bukan keluarganya, antek2nya paling org yg suka ngisap2/penjilat...puehhh"

2. Bahwa kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo keberatan dan pada tanggal 20 Mei 2014 Bupati Gowa

memanggil saksi Paharuddin Wella untuk menyerahkan surat pengaduan kepada Kapolres Gowa yang isinya adalah Bupati Gowa keberatan dengan isi percakapan yang di tulis oleh terdakwa di grup ikasalis 99 tersebut.

3. Bahwa Grup Line IkaSalis 99 dibentuk oleh saksi M Nasrum dan sejak di bentuk anggotanya adalah 7 (tujuh) orang yaitu M Nasrum, Fahmi Ramli, Fadli Rahim (terdakwa), Uchu Smile, Ninin Erdiningsih, Hasni Hamka, dan Farahdilla yang berisikan alumni SMA 159 (satu lima Sembilan) Sungguminasa Kabupaten Gowa.
4. Bahwa sebelum terdakwa menuliskan kata-kata tersebut maka percakapan grup adalah membanding-bandingkan daerah lain dengan daerah gowa.
5. Bahwa jam 12:45 Ucu smile menulis di grup bahwa "bupati gowa banyak korupsi dan kurang pergaulannya" kemudian pada jam 12:45 Fahmi yang menulis di bawahnya "auu betulkah itu Paklek".
6. Bahwa setelah jam 12:45 saksi M Nasrum menulis "aii Ballassi Bosnya Paklek" dan pada jam 12:49 uchu smile mengirimkan gambar kartun dan kemudian dibawah gambar yang dikirim oleh Uchu smile adalah kata-kata yang ditulis terdakwa pada pukul 14:08.
7. Bahwa pada jam 14:22 terdakwa juga menuliskan " beugh telatko' pppi sudahmi ku screen shoot br ku print.bsk ku pajang di Lobi ktr Bupati, sa kasi Tag Line GOWA DI AMBANG BADAI".
8. Bahwa saat menuliskan percakapan tersebut, terdakwa sedang berdinis luar bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kab.Gowa kemudian

kepala dinas menelpon terdakwa untuk menemuinya di rumah jabatan bupati karena ia dipanggil oleh Bupati Gowa.

9. Bahwa setelah tiba di Rumah Jabatan Bupati, terdakwa menunggu sekitar kurang lebih setengah jam, kemudian terdakwa didatangi kepala dinas Parawisata dan dimintai kedua handphonenya lalu handphone tersebut di bawa ke dalam rumah jabatan kemudian kepala dinas keluar dan menanyakan kepada terdakwa "apa yang sudah kau bilang kepada Bupati.
10. Bahwa kemudian terdakwa melihat kepala dinas PL dan Kepala Bagian Umum datang ke rumah jabatan bupati , kemudian Kadis PU mendatangi terdakwa dan memerintahkannya untuk membuka kata sandi handphone android terdakwa sehingga terdakwa membuka kata sandi awal handphonenya kemudian membeikan kepada Kadis PU, dan kemudian setengah jam kemudian Kadis PU kembali datang memerintahkan terdakwa untuk membuka kata sandi grup Imelnya.
11. Bahwa kemudian terdakwa merrlfeuK^Kata sandi aplikasi Line-nya kemudian terdakwa menghapus percakapannya di Grup Line Ikasalis 99 kemudian memberikan handphonenya kepada Kadis PU.
12. Bahwa setelah itu terdakwa menelpon saksi M Nasrum dan bertanya kepada M Nasrum " mengapa ia dipanggil oleh bupati", bahwa pertanyaan saksi di jawab oleh saksi M Nasrum bahwa ia tidak mengetahui .mengapa terdakwa di panggil oleh Bupati Gowa .

13. Bahwa Kabag umum keluar dan menyerahkan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa bertanya apakah ada sesuatu dengan handphone saya kemudian di jawab oleh Kabag Umum tidak ada apa-apa lalu kadis parawisata mengajak terdakwa pulang.
14. Bahwa kemudian diperjalanan, Kadis Parawisata dipanggil kembali ke rumah jabatan sehingga kadis dan terdakwa kembali ke sana dan saat menunggu diparkiran terdakwa melihat saksi Hasni keluar dari rumah jabatan bupati sehingga terdakwa mencurigai bahwa percakapan di grup line telah diketahui oleh bupati kemudian terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi M Nasrum yaitu " (Vlintol ka hubungi teman teman yang lain buat delete conversation kecuali hasni karena dia yang jual ka" .
15. Bahwa sore hari tanggal 6 mei 2014, saksi Hasni dipanggil oleh Bupati Gowa dirumah jabatan bupati Gowa dan diminta untuk memperlihatkan percakapan Grup Like Ikasalis 99 sehingga saksi hasni memberikan handphone miliknya kemudian bupati gowa membaca isi percakapan di Grup Ikasalis 99 lalu bupati Gowa menyerahkan kembali Handphone milik Hasni kemudian saksi Hasni disuruh pulang ke rumah.
16. Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa dan atas kejadian ini terdakwa telah di periksa di Inspektorat Kabupaten Gowa.
17. Bahwa terdakwa mendapatkan sanksi akibat pelanggaran disiplin berat berupa penurunan pangkat dari gol. III/b ke gol. III a.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun /2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

- Setiap Orang ;
- Dengan Sengaja dan tanpa Hak ;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa secara umum untuk memenuhi unsur ini seseorang atau badan hukum itu telah memenuhi kualifikasi penyanggah hak dan kewajiban serta kemampuan bertanggung jawab. Dalam hal ini orang sebagai subyek hukum adalah orang yang tidak cacat mental atau sakit yang menyebabkan tidak adanya kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Fadli Rahim S.Sos Bin Abd.Rahim Hanapi adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga sepanjang persidangan tidak ada satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa telah terbukti.

Ad. 2 Dengan Sengaja dan Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat 3 UU RI no 11 tahun 2008 ini mensyaratkan adanya ke" sengaja" dalam perbuatan pelaku dimana sengaja adalah merupakan

sikap batin seseorang yang tidak dapat diketahui kecuali dengan mengamati dan mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pengertian yang paling sering dipakai oleh para praktisi hukum yang menjelaskan tentang unsur "sengaja" atau opzet dikenal dengan istilah asing " Willens En Wetens " , yang secara gramatikal berarti dikehendaki dan diinsyafi. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi, tidak hanya berarti apa yang betul-betui dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Menimbang, bahwa dalam Praktek peradilan dan menurut doktrin kesengajaan memiliki 3 (tiga) gradasi (S.R Sianturi , Hal 170-178), yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) , bahwa yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), bahwa yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa Sengaja termasuk unsur subyektif yang ditujukan terhadap perbuatan, artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk

menista, tidak termasuk unsur "sengaja". Sengaja disini, tidak begitu jauh karena disini tidak diperlukan "maksud lebih jauh" (Dr. Leden Marpaung, SH, Tindak pidana terhadap kehormatan , hal 10 , Sinar Grafika) .

Menimbang, bahwa pembuktian di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari selasa tanggal 6 Mei 2014 jam 14.08 wita, terdakwa menuliskan percakapan di grup line ikasalis 99 yaitu:

"Saya Setuju Gowa tidak Inovatif, Money oriented, Power Legacy, arrrgghhh, tena kabajikang, jai2mi investor nda jadi invest ka nda dkasiki bagian bupatina, saing diamami, klo nda ada untungna buat dia ndajd proyekka."

Dan Pada pukul 14:10 wita terdakwa kembali menulis :

"Kalo ada yg bilang bupati gowa bagus, kl bukan keluarganya, antek-anteknya paling orang yang suka ngisap/penjilat, puehhh";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasni, saksi Ninin dan saksi M Nasrum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka Bupati Gowa yang dimaksud dalam percakapan ini adalah bupati Gowa sekarang ini yaitu saudara Ichsan Yasin Limpo.

Menimbang, bahwa sebelum menulis percakapan tersebut, telah terjadi pembicaraan awal di grup tersebut yaitu membandingkan daerah masing-masing, kemudian Jam 12:45 Ucu smile menulis di grup bahwa "bupati gowa banyak korupsi dan kurang pergaulannya" kemudian pada jam 12:45 Fahmi yang menulis "auu betulkah itu Paklek". Bahwa setelah jam 12:45 saksi M Nasrum menulis "aii Ballassi Bosnya Paklek" dan pada jam 12:49 uchu smile mengirimkan gambar kartun

dan kemudian dibawah gambar yang dikirim oleh Uchu smile adalah percakapan yang ditulis terdakwa pada pukul 14:08.

Menimbang, bahwa kata "Paklek" dalam percakapan tersebut menunjuk kepada terdakwa karena paklek adalah nama panggilan terdakwa dimasa SMP.

Menimbang, bahwa pada jam 14:22 wita terdakwa juga menuliskan " beugh telatko pppi sudahmi ku screen shoot br ku print,bsk ku pajang di Lobi ktr Bupati, sa kasi Tag Line GOWA DI AMBANG BADAI".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa percakapan yang ditulis oleh terdakwa pada pukul 14.08 wita dan 14.10 wita adalah spontanitas, dan hanyalah respon terdakwa atas tanggapan yang dilemparkan oleh anggota grup lainnya sedangkan percakapan yang ditulis terdakwa pada pukul 14:22 Wita adalah dalam konteks bercanda dan tidak ada niat terdakwa untuk mewujudkan apa yang dikatakan tersebut.

Menimbang, bahwa tim penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur "Dengan Sengaja" tidak terbukti karena :

- Terdakwa tidak memiliki "Wens Rea " atau niat jahat saat mengetik percakapan di Grup Ikasalis 99 dan juga tidak punya niat untuk menyebar luaskan isi percakapan tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki motivasi untuk menghina Bupati sebagai tujuan karena terdakwa sendiri tidak pernah punya masalah pribadi dengan bupati yang memungkinkan terdakwa berniat jahat merendahkan bupati Gowa, begitu juga bahwa tidak ada motivasi dari terdakwa untuk menyiarkan atau menyebar luaskan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi kewajiban yuridis bagi majelis hakim untuk menilai apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya mengandung unsur "Dengan sengaja " sebagaimana di Syaratkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik".

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah unsur "dengan sengaja" terpenuhi atau tidak dalam perbuatan terdakwa, maka majelis hakim akan mencermati terlebih dahulu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa setelah menulis kata-kata percakapan yang ditujukan kepada Bupati Gowa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di parkir rumah jabatan Bupati karena di perintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata untuk menyusul nya disana. Setelah terdakwa menunggu sekitar kurang lebih setengah jam, kemudian terdakwa didatangi kepala dinas Parawisata dan dimintai kedua handphonenya lalu handphone tersebut di bawa ke dalam rumah jabatan kemudian kepala dinas keluar dan menanyakan kepada terdakwa "apa yang sudah kau bilang kepada Bupati".

Menimbang, kemudian terdakwa melihat kepala dinas PU dan Kepala Bagian Umum datang kerumah jabatan Bupati, kemudian Kadis PU mendatangi terdakwa dan memerintahkannya untuk membuka kata sandi handphone android terdakwa sehingga terdakwa membuka kata sandi awal handphonenya kemudian memberikan

kepada Kadis PU, dan kemudian setengah jam kemudian Kadis PU kembali datang dan memerintahkan terdakwa untuk membuka kata sandi grup linenya dimana terdakwa membuka kata sandi aplikasi Line-nya kemudian terdakwa menghapus percakapannya di Grup Line Ikasalis 99 kemudian memberikan handphonenya kepada Kadis PU.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencurigai bahwa pembicaraan dalam Grup Ikasalis 99 telah diketahui bupati gowa sehingga terdakwa menelpon admin yaitu saksi M Nasrum untuk menanyakan mengapa terdakwa dipanggil Bupati Gowa yang di jawab oleh saksi M Nasrum bahwa ia tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa kemudian kabag umum keluar dan menyerahkan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa bertanya kabag umum apakah ada sesuatu dengan handphone saya kemudan di jawab tidak apa-apa, kemudian Kadis Parawisata berkata ayo kita pulang.

Menimbang, Bahwa ternyata saat baru tiba di pintu gerbang kadis parawisata di telpon supaya kembali ke rumah jabatan bupati Gowa sehingga mereka kembali ke Rumah jabatan Bupati dan saat menunggu di parkir terdakwa melihat saksi Hasni keluar dari rumah jabatan Bupati sehingga terdakwa yakin bahwa percakapan di grup line Ikasalis 99 telah diketahui oleh Bupati kemudian terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi M Nasrum yaitu " Mintol ka hubungi teman teman yang lain buat delete conversation kecuali hasni karena dia yang jual ka" .

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis hakim menggaris bawahi beberapa peristiwa hukum yang penting yang dapat menentukan apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengandung unsur kesengajaan atau tidak, yaitu :

- Bahwa benar terdakwa telah menuliskan percakapan di Grup Line Ikasalis 99 yang merujuk kepada Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo ;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa percakapan tersebut dapat menyinggung Bupati Gowa sehingga ketika terdakwa di perintahkan untuk membuka aplikasi Linenya terdakwa segera menghapus percakapan dalam Grup Ikasalis 99 dimana dari bundle transkrip tercatat bahwa terdakwa adalah anggota grup pertama yang meninggalkan grup tersebut
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa dalam line terdakwa terdapat banyak grup termasuk dalamnya grup hacker amatir dan grup game, namun ternyata Hanya Admin Grup Ikasalis 99 yaitu saksi M Nasrum yang ditelpon oleh terdakwa untuk meminta kejelasan penyebab ia di panggil oleh Bupati Gowa , dan selanjutnya terdakwa mengirimkan sms kepada admin Grup n Ikasalis 99 " Mintol ka hubungi teman teman yang fain buat delete conversation kecuali hasni karena dia yang jual ka" ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menunjukkan adanya langkah-langkah yang secara sistematis dilakukan oleh terdakwa disaat ia menyadari bahwa percakapan yang di tulisnya dalam Grup Ikasalis 99 tersebut telah diketahui oleh Bupati Gowa.

Menimbang, bahwa perbuatan sistematis tersebut dapat dilihat dari adanya langkah-langkah preventif yang diambil oleh terdakwa untuk mencegah diketahuinya percakapan yang di tulisnya di Grup Line Ikasalis yaitu dengan menghapus percakapan tersebut , meninggalkan grup dan menyuruh anggota grup lainnya untuk ikut menghapus percakapan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa menuliskan percakapan pada jam 14:08 wita dan 14:10 wita di Grup Line Ikasalis 99 yang diikuti dengan perbuatan terdakwa lainnya yaitu menghapus percakapan dan meminta anggota lain menghapus percakapan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang di kehendaki atau di insyafi oleh terdakwa, tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh terdakwa, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri, sebagaimana yang diterangkan dalam doktrin diatas. Adapun terhadap gradasi dari kesengajaan perbuatan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat perbuatan tersebut termasuk dalam dolus eventualis (kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti namun merupakan kemungkinan), dimana kemungkinan besar dari akibat perbuatan terdakwa adalah kata-kata yang terdakwa tuliskan dapat mengakibatkan orang lain dalam hal ini Bupati Gowa tersinggung dan percakapan yang terdakwa tulis dapat tersebar keluar dari grup, dimana menjadi fakta yang terbantahkan dalam persidangan ini bahwa benar percakapan mengakibatkan Bupati Gowa tersinggung sehingga mendudukkan terdakwa di kursi pesakitan.

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa di persidangan bahwa ia telah berusaha meminta maaf kepada Bupati termasuk menghubungi orang-orang yang dianggap oleh terdakwa mampu untuk memfasilitasi terdakwa, supaya bisa bertemu Bupati dengan tujuan meminta maaf, maka hal ini menunjukkan bahwa terdakwa

secara sadar memahami/menginsyafi bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak benar dan berusaha memperbaikinya dengan cara meminta maaf.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Tim penasehat hukum dan terdakwa sendiri bahwa tidak ada niat jahat atau motivasi terdakwa untuk menghina Bupati Gowa , maka majelis hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 menganut kaidah hukum bahwa Dalam tindak pidana menista dengan surat (smaadschrift) dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam Buku ke-II Bab ke- XVI KUHP tidak perlu adanya Animus Injuriandi, yakni Niat untuk menghina .

Menimbang, Bahwa Dr Leden Marpaung, SH dalam bukunya Tindak Pidana terhadap Kehormatan memberikan penjelasan terhadap kaidah hukum tersebut sebagai berikut:

Dalam hal ini, cukup si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata " menista". Bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari Dolus atau Opzet. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar. Selain itu, perlu disadari bahwa Niat belum masuk lingkungan ilmu hukum pidana. Mempunyai niat, belum dapat di hukum, tetapi dalam agama, memang telah merupakan dosa.

Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi tim penasehat hukum tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan terhadap unsur "dengan sengaja" telah terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut berdasarkan atas hak atau kewenangan yang melekat pada dirinya atau tidak.

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun 2008 ini erat kaitannya dengan sifat melawan hukum yang terdapat pada perbuatan mendistribusikan, mentranmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut. Dengan kata lain orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses suatu informasi elektronik tidak boleh dipidana.

Menimbang, bahwa undang -undang No 11 tahun 2008 sendiri tidak merujuk kepada syarat-syarat tertentu dalam hal seseorang dinyatakan berhak atau tidak berhak untuk melakukan distribusi. transmisi atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga untuk mendapatkan patokan yang jelas maka majelis hakim akan merujuk genus dari pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun 2008 ini yaitu dalam bab XVI buku II

KUHP Pasal 310 jo 316 KUHP tentang penghinaan , dimana pencemaran nama baik (menista) adalah merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP (R.Susilo , 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 225).

Menimbang, bahwa dalam pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Menimbang, bahwa pasal diatas dimaksudkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang namun tentu saja dalam penyampaian tetap ada norma-norma yang membingkai kebebasan berpendapat tersebut sehingga dalam menyampaikan pendapat tidak ada hak-hak orang lain didalamnya yang bersinggungan.

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (perkara No. 50/PUU-VI/2008) yang menyatakan bahwa Mahkamah konstitusi mengakui hak tiap warga Negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi penasehat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa berhak dan berwenang untuk menyatakan pendapat sebagaimana yang di tulisnya dalam Grup Ikasalis 99 haruslah diuji dengan syarat yang disebutkan dalam pasal 310 ayat 3 KUHP yaitu harus berkaitan dengan kepentingan umum atau pembelaan diri .

Menimbang, bahwa untuk mengajukan alasan demi kepentingan umum (kepentingan Gowa) sebagaimana didalilkan oleh penasehat umum ketika berbicara masalah konteks percakapan, maka haruslah di buktikan bahwa kepentingan umum diuntungkan dengan tuduhan tersebut (hukum pidana, Bag II, Balai Lektur Mahasiswa, hal 616) dan juga isi dari tuduhan tersebut adalah benar dan tidak boleh Palsu (bandingkan dalam putusan 1190 / PID.B / 2010 / PN.TNG).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa menulis percakapan di Grup Line Ikasalis 99 yaitu : Pukul 14.08 wita :

" Saya Setuju Gowa tidak Inovatif. Money oriented, Power Legacy, arrrgghhh, tenackabajikang, jai2mi investor nda jadi invest ka nda dikasiki bagian bupatina, saing diamami klo nda ada untungna buat dia ndajadi proyekka."

Adalah didasarkan pada cerita orang-orang yang didengarkan oleh terdakwa sehingga dari cerita-cerita yang terdakwa dengarkan tersebut, terdakwa menyimpulkan dan dari kesimpulan yang didapatkan oleh terdakwa tersebut dituangkan dalam kata-kata sebagaimana dituliskan oleh terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa begitu pula ketika terdakwa pada pukul 14:10 wita menuliskan "Kalo ada yang bilang Bupati Gowa bagus, kalo bukan keluarganya, antek2nya paling orang yang suka ngisap2/penjilat...puehhh", dimana kata-kata tersebut didasarkan pada blog seseorang yang dibaca oleh terdakwa beberapa hari sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa sebelum menuliskan percakapan tersebut terdakwa tidak pernah melakukan survey, penelitian ataupun terdakwa tidak memiliki data-data pendukung terhadap pernyataannya atau tuduhannya sebagaimana yang dituliskan dalam percakapan di Grup Line Ikasalis 99.

Menimbang, bahwa Ahli Linguistik dan Budaya Alwy Rahman dan Ahli Bahasa Hasina Fajrin pada pokoknya memiliki kesamaan pendapat yang jika diintisarikan sebagai berikut:

Bahwa cara bertutur atau berkomunikasi seseorang dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya, pengalaman budaya. Latar belakang pendidikan dan Karakteristik/kepribadiannya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan maka terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku aktif yang telah menuliskan percakapan di Grup Line Ikasalis 99 pada pukul 14:08 wita dan 14:10 wita, telah menuliskan sebuah tuduhan yang tidak didukung oleh data-data yang valid.

Menimbang, bahwa Di persidangan majelis hakim telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada terdakwa dan tim penasehat hukumnya untuk membuktikan validitas dari tuduhannya tersebut namun ternyata terdakwa maupun Tim penasehat hukumnya tidak memberikan pembuktian apapun terkait kebenaran tuduhan terdakwa kepada Bupati Gowa sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa informasi yang dituliskan oleh terdakwa dalam grup ikasalis 99 in casu adalah informasi yang tidak mempunyai/didasarkan data yang valid, sehingga dengan demikian terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan tersebut berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan Gowa pada khususnya, sehingga uraian ini sekaligus membantah argument tim penasehat hukum tentang kewenangan terdakwa menyampaikan pendapat dikaitkan dengan kepentingan Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan unsur " tanpa Hak" telah memenuhi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ad 2 ini telah terbukti menurut hukum.

AD 3 . Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka seluruh rangkaian elemen unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa undang-undang no 11 tahun 2008 tidak memberikan penjelasan mengenai tindakan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat di akses sehingga majelis hakim berpedoman pada penjelasan ahli komunikasi multimedia yaitu saudara Donny UB yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Mendistribusikan lebih tepat digunakan dalam pendekatan komunikasi massa maka arti mendistribusikan adalah ke banyak tempat;
- Dalam konteks teknologi internet, ditransmisikan dari satu titik ke titik lainnya maka mentransmisikan sesuatu haruslah menggunakan medium;
- Bahwa ketika Si A bergabung dalam suatu Grup social media, kemudian si A menuliskan sesuatu dalam group media social tersebut maka tindakan si A disebut juga mentransmisikan karena ada pesan yang tersampaikan;
- Bahwa membuat dapat diakses maksudnya bahwa dalam internet bisa saja informasi elektronik yang dimiliki dalam keadaan tersimpan dan orang lain tidak mengetahuinya namun tidak diketahui bukan berarti terkunci sehingga kalau kemudian lokasi dari informasi diberikan kepada orang lain seperti membuat tautan maka informasi tersebut dapat di akses;

Menimbang, bahwa menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 4 dan angka 1, berbunyi:

Angka 4.



“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang- yang mampu memahaminya”

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam argumennya menyatakan bahwa unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses haruslah dalam konsep penyebaran informasi elektronik kepada orang banyak atau komunikasi massa dan tidak termasuk kedalam komunikasi privat atau komunikasi kelompok.

Menimbang, bahwa maka menjadi kewajiban hukum dari majelis hakim untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah masuk ruang lingkup mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat di akses suatu informasi atau data elektronik .

Menimbang, bahwa ahli Donny B memberikan definisi dari aplikasi line sebagai salah satu aplikasi chatting atau berkomunikasi yang menggunakan perantara internet atau computer, singkatnya Line adalah salah satu varian seperti BBM. We Chat dan produk messenger lainnya dan grup line adalah komunikasi kelompok yang terbatas yang lebih interpersonal atau lebih hangat dan lebih santai, sehingga apabila ada interfere dari orang yang baru maka komunikasi dalam grup akan menjadi kaku dan terkesan saling menahan atau jaga omongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan terdakwa sendiri maka di dapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 di Grup Line Ikasalis 99, terdakwa menuliskan percakapan pada jam 14:08 wita yaitu "Saya Setuju Gowa tidak Inovatif. Money oriented, Power

Legacy, arrrgghhh, tena kabajikang, jai2mi investor nda jadi invest ka nda dikasiki bagian bupatina, saing diamami klo nda ada untungna buat dia nda jd proyekka." dan pada jam 14:10 wita yaitu "Kalo ada yang bilang Bupati Gowa bagus. kl bukan keluarganya, antek2nya paling org yg suka ngisap2/penjilat, puehhh".

Menimbang, bahwa dari penjelasan ahli Donny maka percakapan yang ditulis oleh terdakwa tersebut termasuk kedalam informasi elektronik dimana media yang digunakan oleh terdakwa adalah media Grup line yang berbasis internet.

Menimbang, bahwa sedangkan bila dikaitkan dengan pengertian yang diberikan oleh ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa percakapan yang dikirim oleh terdakwa adalah proses mentransmisikan karena singkatnya menurut ahli Donny B mentransmisikan atau mendistribusikan dalam konteks internet adalah bagaimana suatu pesan digital bisa tersampaikan kepada orang lain karena ada proses transmisi tadi, artinya ada pengirim ada penerima dan pesan dapat dibaca oleh penerima pesan .

Menimbang, bahwa pesan yang dimaksudkan terdakwa tersampaikan kepada anggota grup lainnya terbukti bahwa dalam grup tersebut terjadi percakapan yang disebut ahli linguistik Alwy Rahman sebagai gilir tutur atau bergantian saling menanggapi.

Menimbang, bahwa namun yang harus terang dalam perkara ini adalah apakah perbuatan terdakwa mentransmisikan suatu informasi dalam Grup Line adalah dalam

konteks penyebar luasan mengingat penasehat hukum mendalilkan bahwa percakapan yang terjadi di grup ini adalah jenis percakapan kelompok yang bersifat private.

Menimbang, bahwa ahli Donny B menjelaskan jenis-jenis komunikasi dilihat dari jumlah dan karakter peserta komunikasinya yaitu pertama adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar orang per orang, yang kedua adalah komunikasi kelompok atau komunikasi antara sahabat, ketiga adalah komunikasi antar kelompok dan terakhir adalah komunikasi massa atau komunikasi publik yang cakupannya lebih luas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi M Nasrum bahwa:

Bahwa saksi adalah penggagas atau pembentuk grup line ikasalis 99 yaitu grup yang menampung alumni SMA 159 Sungguminasa angkatan 99 yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar alumni.

- Bahwa Grup Line Iksalis 99 ini adalah perpanjangan dari grup dari BBM yang hanya mampu menampung 30 (tiga puluh) anggota sedangkan di grup ikasalis 99 mampu menampung 200 (dua ratus)
- Bahwa saksi telah mengundang para alumni Iksalis 99 akan tetapi tidak semua alumni menerima undangan tersebut dengan alasan bahwa cukup di grup bbm saja;
- Bahwa saksi dan anggota grup lainnya bukanlah satu geng atau satu kelompok di SMA hanya ada beberapa anggota grup yang pernah satu organisasi ketika SMA;
- Bahwa percakapan di grup menjadi ramai pada hari itu karena ada salah satu anggota grup yaitu Uchu smile yang baru bergabung digrup tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dari keterangan saksi diatas dengan pendapat ahli maka majelis hakim menilai bahwa yang bisa bergabung dan

mendapatkan informasi percakapan dalam grup tersebut adalah anggota grup saja, akan tetapi menilik dari awal pembentukan grup tersebut yang merupakan perpanjangan dari grup bbm yang hanya mampu menampung 30 (tiga puluh) anggota sedangkan di Grup line mampu menampung sampai 200 (dua ratus) anggota, maka komunikasi kelompok yang disetarakan sebagai komunikasi sahabat dengan jumlah yang terbatas sebagaimana disyaratkan oleh Ahli Donny B tidak terlihat dalam sifat Grup ini.

Menimbang, bahwa adapun jumlah grup tersebut yang hanya 7 (tujuh) orang tidak mengakibatkan grup ini dinyatakan serta merta sebagai grup sahabat yang tertutup karena perlu digaris bawah bahwa banyak alumni IKASALIS 99 yang di undang oleh saksi M Nasrum namun hanya 6 (enam) anggota grup yang menerima dan bergabung dalam grup tersebut dan yang aktif dalam percakapan hanya saksi Nasrum, terdakwa, fahmi , uchu smile, dan Ninin sedangkan dilla dan hasni menjadi pengamat atau dalam istilah percakapan media sosial disebut silent reader.

Hal ini dapat dibedakan apabila suatu grup tersebut hanya berisi 7 (tujuh) orang sahabat dan tertutup hanya untuk ke tujuh sahabat tersebut tanpa penambahan anggota luar manapun, apalagi menjadi fakta hukum bahwa hari itu grup menjadi hidup karena ada anggota baru yang bergabung yaitu uchu smile sehingga membuktikan bahwa grup ini adalah grup yang terbuka menerima anggota alumni sma 159 angkatan 99 sehingga jumlah anggotanya senantiasa berfluktuasi atau tidak tetep.

Menimbang, bahwa ahli Donny berpendapat bergabung dalam suatu komunitas itu bukan berarti ia bisa berlangsung berkomunikasi, atau yang ada di dalam komunitas mau berkomunikasi dengannya, jadi yang disyaratkan dalam komunikasi kelompok adalah jumlah pesertanya tidak banyak lalu mereka memiliki kesamaan dan mereka "menyepakati" etika atau cara komunikasi yang unik hanya dalam kelompok itu.

Menimbang, bahwa grup line ikasalis 99 memiliki kesamaan yaitu sama-sama berasal dari alumni SMA yang sama, akan tetapi apakah anggota grup berada dalam tataran etika yang sama atau cara komunikasi yang unik.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta hukum bahwa saat percakapan mengenai Bupati Gowa dilemparkan oleh terdakwa kedalam forum Grup line maka saksi Hasni yang merupakan anggota grup memberikan reaksi berupa teguran kepada terdakwa " Fad, Jaga Bicarata" .Berdasarkan keterangan saksi Hasni ia menegur terdakwa karena merasa terdakwa telah melanggar etika mengingat terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa hal semacam ini menunjukkan bahwa ternyata dalam grup tersebut terdapat perbedaan persepsi mengenai etika dalam grup ini yang berimbas pada penolakan/peneguran oleh salah seorang anggota grup (saksi Hasni) terhadap cara berkomunikasi/ salah satu anggota grup lainnya (terdakwa in casu).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa ternyata karakteristik komunikasi kelompok yang dipaparkan oleh para ahli tidak terdapat dalam Grup Ikasalis 99 dan perbuatan terdakwa mentransmisikan informasi elektronik berupa percakapan dalam grup line ikasalis 99 tidak dapat dikategorikan sebagai percakapan private sehingga majelis menolak argument penasehat hukum yang menyatakan bahwa percakapan dalam grup ikasalis bersifat privat atau eksklusif dan harus dilindungi.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim menilai bahwa terdakwa sepatutnya menyadari bahwa media social berbasis internet dalam bentuk apapun merupakan sebuah medium yang mampu menyebarkan informasi secara massif dan berpotensi menjadi tidak terkenal diluar apa yang dibayangkan oleh penggunaan sehingga kendali utama pada kearifan dan kebijakan dari pelaku dalam penggunaan media social tersebut.

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dalam ad 3 adalah mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa menurut Drs. H. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Hukum Pidana Positif Penghinaan, disebutkan dalam frasa yang memiliki muatan penghinaan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam bab XVI KUHP mulai Pencemaran, Fitnah, Penghinaan Ringan, Pengaduan Fitnah, Menimbulkan Persangkaan Palsu

sampai penghinaan pada orang mati, sedang dalam frasa Pencemaran Nama Baik maksudnya adalah Pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa penghinaan dapat di terjemahkan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang di lakukan secara lisan maupun tertulis . Bahwa penghinaan atau dalam bahasa asing disebut dengan defamation , secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Menimbang, bahwa tim penasehat hukum terdakwa memberikan argumentasi bahwa muatan penghinaan atau pencemaran nama baik haruslah ditafsirkan berdasarkan pada ketentuan Bab XVI buku II KUHP tentang Penghinaan khususnya berkaitan dengan ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tafsiran sistemis bahwa pasal 310 adalah Genus dari pasal 27 ayat S.Hal ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa makna dari penghinaan atau pencemaran nama baik mengikuti pasal 310 dalam KUH Pidana. Maka dalam menafsirkan unsur ini penasehat hukum terdakwa mengikuti putusan Mahkamah konstitusi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penasehat hukum terdakwa ketidak hadirannya Bupati Gowa di persidangan mengakibatkan tidak dapat di buktikan apakah korban merasa terhina atau nama baiknya tercemarkan; Menimbang, bahwa dengan adanya argumen yang disampaikan oleh penasehat hukum seperti tersebut

diatas maka sekarang yang harus dikaji adalah apakah ketidak Bupati di persidangan mengakibatkan pembuktian di persidangan menjadi summir atau tidak.

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP diatur dalam pasal 183 KUHAP yaitu " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" sedangkan macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 264 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paharuddin Warella bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 saksi dipanggil oleh Bupati Gowa dan perintahkan untuk menyerahkan surat kepada Kapolres terkait kasus percakapan yang ditulis oleh terdakwa di grup Line ikasalis 99 dan Bupati Gowa menyatakan bahwa saya tidak suka dikasih begini saat menyerahkan surat tersebut kepada saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasni dan saksi Ninin serta terdakwa sendiri bahwa mereka bertiga pernah di periksa di Inspektorat terkait percakapan di grup line yang di tulis oleh terdakwa dan dari keterangan ketiganya didapatkan persesuaian fakta bahwa bupati Gowa keberatan dengan percakapan yang di tulis oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di perlihatkan surat pengaduan dari Bupati Gowa (tertanggal 20 Mei 2014) yang menerangkan keberatannya terhadap konten percakapan yang berbunyi.

" Saya Setuju Gowa tidak Inovatif.Money oriented, Power Legacy..arrggghhh.. tena kabajikang..jai2mi investor nda jadi invest ka nda dkasiki bagian bupatina.,saing diamamLKI nda ada untungna buatdia nda jd proyekka.."

"Kalo ada yg bilang bupati gowa bagus.kl bukan keluarganya, antek2nya paling org yg suka ngisap2/penjilat...puehhh"

" beugh telatko pppi sudah ku screen shoot ku print.bsk ku pajang di Lobi ktr Bupati, sa kasi Tag Line GOWA DIAMBANG BADAI";

Yang kesemua content tersebut adalah percakapan yang di tulis oleh terdakwa dalam di grup Line Ikasalis 99.

Menimbang, bahwa dari point ke 3 surat pengaduan tersebut Bupati Gowa menyatakan bahwa komentar atau pernyataan terdakwa pada aplikasi social media line sebagaimana ter kutip diatas jelas menghina dan mencemarkan nama baik dari bupati gowa sehingga ia merasa di rugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, serta pendapat ahli, maka kata kata yang ditulis oleh terdakwa tersebut semuanya merujuk pada Bupati Gowa sekarang yaitu Ichsan Yasin Limpo.

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan juga diakui oleh penasehat hukum adalah bahwa yang dituduh adalah Bupati Gowa dan terdakwa tidak pernah menunjuk nama Ichsan Yasin Limpo sebagai pribadi.

Menimbang, bahwa dari lampiran pembelaan penasehat hukum berupa artikel yang ditulis oleh Reydi Vridell Awawangi berjudul Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronika pada halaman 119 menyatakan " untuk kejahatan pencemaran nama baik atau penghinaan atau semua penghinaan yang diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP ini adalah delik aduan, terkecuali pasal 316 yaitu penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang bertugas yang sa/?.Penuntutan untuk pasal 316 ini tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang dihina (bukan delik aduan).Namun. dalam hal praktiknya, pegawai negeri yang dihina itu diminta membuat pengaduan (vide yurisprudensi HR 17 Nop 1924 N.J 1925 157 W 11305).

Menimbang, bahwa pengaduan disini tidak diatur harus dalam bentuk tertulis atau lisan sehingga majelis hakim berpendapat kedua model pengaduan tersebut dapat di pakai.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang saling berkesesuaian maka majelis hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar Bupati Gowa dalam ini Ichsan.

Yasin Limpo merasa kebetaran atau tersinggung atas tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam grup ikasalis sebagaimana kalimat-kalimat yang di tulis oleh Bupati Gowa dalam suratnya, dan kalimat tersebut dirasakan Bupati Gowa telah mencemarkan nama baiknya. Hal mana uraian tersebut sekaligus sebagai pembantah

argument dari tim penasehat hukum bahwa ketidak hadiran bupati gowa mengakibatkan pembuktian menjadi summir.

Menimbang, bahwa ahli Alwy Rahman berpendapat percakapan yang ditulis terdakwa harus dilihat secara konteks yaitu wacana yang berkembang dalam percakapan itu tanpa memenggal kalimat per kalimat, karena ahli tidak dapat menafsir makna suatu kalimat apabila dia dilepas dari hubungannya dari penutur dan petutur karena suatu kalimat itu sifatnya redaksional.

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli Alwy Rahman bahwa Bahwa kata kata yang ditulis terdakwa " Saya setuju gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy, " adalah bermakna positif karena menunjukkan keinginan penulis agar Kabupaten Gowa lebih baik, kata kata "jai jaimi investor tidak jadi inveska ndak dikasihki bagian bupatinya sangin dia mami kalo dak ada untungna buat dia nda jadi proyekka" menunjukkan silogisme turunan yaitu kata yang menguatkan argument pertama akan tetapi di akhiri dengan kalimat Negasi.

Menimbang, bahwa kalimat Negasi (ingkaran) adalah suatu pernyataan yang diperoleh dari suatu pernyataan sebelumnya dan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya, singkatnya Negasi atau ingkaran adalah pernyataan yang kebenarannya berlawanan dengan pernyataan semula. Kalau kalimat yang semula benar, berarti negasinya salah. Kalau kalimat yang semula salah, berarti negasinya harus benar.

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi dalam perkara ini bahwa Frasa "jai jaimi investor tidak jadi inveska ndak dikasihki bagian bupatinya sanging dia mami kalo dak ada untungna buat dia nda jadi proyekka" adalah kalimat negasi yang dimaksudkan oleh ahli atau kalau dihubungkan dari pengertian diatas maka frasa tersebut adalah kalimat yang mempunyai Nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya.

Menimbang, bahwa ahli bahasa Hasina Fajrin berpendapat bahwa :

- inovatif adalah penemuan dalam sesuatu hal yang baru;
- Money oriented adalah berorientasi kepada uang;
- Power Legacy adalah warisan atau kekuasaan yang di wariskan;
- Tena kabajikang adalah tidaffe^{^^i}baikannya yang artinya tidak ada yang baik dimana pengertian kalimat tersebut adalah semuanya jelek;
- jai-jai mi investor nda jadi inves ka nda dikasihki bagian bupatina berarti sudah banyak investor tidak jadi inves karena bupatinya tidak mendapat bagian;
- sanging dia mami artinya dia terus atau dia terus yang mau dapat bagian;
- Antek-anteknya adalah keluarga atau orang-orang yang berafiliasi dengan Bupati;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dalam transkrip tersebut menunjukkan ada interpretasi kalau Bupati melarang berinvestasi apabila tidak mendapat bagian;
- Bahwa dari memaknai kata kata yang di tulis oleh terdakwa maka makna negative yang ditujukan dalam kata kata tersebut adalah kepada bupati;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ninin menyatakan bahwa apabila kalimat tersebut di tujukan kepadanya maka ia akan merasa tidak nyaman dan tersinggung.

Menimbang, bahwa sekalipun wacana atau konteks dari percakapan tersebut adalah kemajuan kabupaten Gowa, majelis hakim sependapat dengan Ahli Hasina

Fajrin bahwa dari sisi etika berbahasa maka ketika akan menyampaikan sesuatu tetap harus menggunakan bahasa yang lebih santun dan apabila menggunakan kata yang tidak vulgar bisa menghindari perasaan tersinggung dari orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa , saksi M Nasrum dan saksi Ninin berpendapat apa yang disampaikan terdakwa semata-mata adalah keluhan /kritik dan semuanya demi kebaikan kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa dalam dinas kebudayaan dan pariwisata ada forum rapat bulanan yang dipimpin oleh Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata membahas isu-isu seputar instansi, dan apabila ada yang harus disampaikan kepada bupati Gowa, maka dalam rapat bulanan tersebutlah disampaikan, lalu kepala dinas yang akan menyampaikan hasil rapat tersebut langsung kepada bupati gowa.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dengan adanya wadah yang telah terbentuk di instansi terdakwa maka sepatutnya keluhan /kritik terdakwa disampaikan dalam jatuhnya tepat apalagi menurut terdakwa bahwa ini semua demi kebaikan kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa Hal semacam ini menurut ahli Alwy Rahman di kenal didalam budaya Kerajaan Gowa yaitu ada suatu budaya mengkritik raja yang disebut Akkjonga atau berburu rusa, ketika berburu rusa maka rakyat boleh bercanda atau

mengejek sang raja dan ini merupakan consensus antara raja dan rakyatnya akan tetapi diluar itu tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa ini menunjukkan bahwa ruang sipil dalam demokrasi budaya bugis Makassar juga dikenal dan diakui namun harus disampaikan dalam jalurnya yang tepat. Hak Warga Negara Dalam Mengemukakan pendapat tidak boleh bersinggungan dengan Hak Warga Negara untuk mendapatkan Perlindungan terhadap penyerangan martabat dan kehormatannya, dan Negara memiliki kepentingan untuk masuk dan menjaga agar hak hak tersebut tidak saling tumpang tindih dan bersinggungan melalui norma-norma yang diatur dalam hukum positif yang berlaku dalam suatu Negara.

Menimbang, bahwa Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "Law as a tool of social engineering" dimana hukum diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum

yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya penggunaan helm dan kelengkapan sim dalam berkendara pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari teori Roscoe Pound tersebut diatas, maka ternyata dalam budaya Bugis Makassar terdapat prinsip atau falsafah hidup yang sangat terkenal yaitu Sipakatau atau melakukan perbuatan/bersifat memanusiakan manusia, artinya tidak bertindak semena-mena terhadap sesama, Sipakalebbi, atau saling menghormati dan menghargai antar sesama, senantiasa saling bertoleransi dan tidak membedakan, Sipakainge, atau saling mengingatkan dalam kata dan perbuatan demi kebaikan, artinya senantiasa saling menasehati.

Menimbang, bahwa kalau dicermati dari hirarki falsafah hidup orang bugis Makassar, maka sipakainge yang berarti saling mengingatkan, saling menasehati atau saling mengkritik, di tempatkan dalam posisi terakhir, artinya bahwa dalam menyampaikan pendapat dalam hal kebaikan sekalipun, tetap harus di sinergikan serta dibingkai dengan sipakatau atau me-manusia-kan manusia dan sipakalebbi atau saling menghormati atau memuliakan sesama.

Menimbang, bahwa bingkai budaya adat istiadat inilah yang dipandang

oleh ahli Alwy Rahman telah bergeser, nilai-nilai adat istiadat dalam masyarakat mulai ditinggalkan sedangkan belum ada nilai-nilai baru yang ditemukan sehingga terjadi apa yang disebut dengan kebablasan demokrasi, dimana semua menyatakan pendapat tapi kurang untuk berkontemplasi atau dalam istilah ahli lebih banyak berada di ruang hadir namun jarang bercakap di ruang sadar atau di ruang batin. Maka disinilah hukum hadir sebagai tool of social engineering sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan oleh hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganggap penting untuk mengupas perkara ini dalam 3 (tiga) perspektif Hukum yaitu Hukum agama Islam (agama dari terdakwa), hukum adat Bugis Makassar (suku dari terdakwa) dan hukum positif Negara RI agar penuntut umum maupun terdakwa dan tim penasihat hukumnya serta seluruh pihak yang setia mengikuti jalannya persidangan ini paham, bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya telah bersungguh-sungguh dengan segenap kewajiban dan kewenangan yang melekat padanya secara konstitusional, untuk melakukan penegakan hukum dalam perkara terdakwa ini.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa percakapan yang terdakwa tuliskan pada jam 14:08 wita dan 14:10 wita di Grup IkaSalis 99 terbukti mengakibatkan bupati Gowa tersinggung karena nama baiknya dicemarkan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti menurut hukum mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana unsur ad 3 dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana di dakwakan dalam dakwaan kesatu dari penuntut umum dan nota pembelaan dari tim penasehat hukum haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua alternatif tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kadar perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) BUNDEL transkrip percakapan media social LINE dengan Grup Ika salis 99 tetap telampir dalam berkas perkara ini dan tidak boleh dinyatakan dimusnahkan karena sebagai bagian dari berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya mampu bersikap santun dan menjadi suri tauladan bagi orang-orang disekitarnya
- Bupati Gowa belum memaafkan perbuatan terdakwa (belum ada perdamaian Dengan Bupati

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun 2008 , pasal 45 ayat 1 UU no 11 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menari kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). Delik pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
2. Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 324/P.idB/2014/PN.SGM Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun /2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah Setiap Orang, Dengan

Sengaja dan tanpa Hak, Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Perlu di lakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap penggunaan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi secara efisien dan efektif tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Perlu penerapan sanksi yang lebih optimal terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, sanksi pidana hanya berupa, perlu di terapkan sanksi sosial yang kuat agar tindakan tersebut dapat di cegah sejak awal.
3. Perlu penanaman kesadaran kebebasan berfikir dan berekspresi yang baik dan benar pada masyarakat, sebab pengungkapan hasil pikiran dalam bentuk apapun tidak boleh merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Sinar Grafika. Jakarta.

RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson. 2003. *Media Massa dan masyarakat modern*. Kencana. Jakarta

Widodo. 2009. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Aswaja pressindo. Yogyakarta.

<http://www.bin.go.id/awas/detil/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.VGzc19aY.dpuf>, (19 Mei 2015).

Mukhlis. 2001. *kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Dwi Rendra Wiratama, 2009. *cybercrime dalam perspektif hukum positif di Indonesia*, UBM. Malang

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* Bandung: Syaamil Cipta Media, 1426/H 2005

Abu Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami'li al-Akham al-Qur'an* Cet. I; Beirut: Muassah al-Risalah, 2006

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta. Rabbani pres, 2000

- J. Satrio. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Romli Atasasmita, 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung
- David I. Baidrige. 2003 *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Heru supratomo. 2001 *Kebijakan Komputer Dan Cyber, Serta Antisipasi Pengaturan Dan Pencegahannya Di Indonesia*. PT Sinar Grafika. Jakarta
- Laden marpaung, 2010. *Tindak pidana terhadap kehormatan*. Sinar grafika, Jakarta.
- Al-Gozali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*. Cet. I; Beirut: Dar Ihya' at-turats al-'Arobi, 2001.
- Ahmad Hasan, 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Muh. Fuad Abdul Baqi, 2011 *Mutiara hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim*, Pustaka As Sunnah. Jakarta
- Graham J H Smith. 2007. *Internet law and regulation*. Thomson Sweet. London
- Andrea kaplan. 2000. *social media for educator*. Kluwer law international. London
- Matthew collins. 2008. *The law of defamation and the internet*. university school of law. Saint luis.
- Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 2001. *Dictionary of the English Language*. American Heritage



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir dari orang tua H.M.Ramli dan Hj.Hawati sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Makassar, 2 Desember 1993. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN Inpres Takalar Kota (lulus tahun 2005). Melanjutkan ke SMP Neg 2 Takalar (lulus tahun 2008), dan SMA Neg 1 Takalar (lulus tahun 2011) hingga akhirnya menempuh masa kuliah di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis juga aktif di berbagai Organisasi, penulis terlibat secara aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Independent Law Student (ILS) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA).

Penulis juga merupakan pengagas salah satu organisasi yang berkonsentrasi di bidang Hukum di kota makassar yaitu Independent Law Student (ILS) pada tahun 2013.

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.